

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus pertama penyebaran COVID-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Ir. Joko Widodo pada 2 Maret 2020, dan dalam waktu singkat menyebar cepat ke berbagai wilayah Indonesia. Bencana non alam COVID-19 telah mengguncang berbagai sektor kehidupan., terutama pada sektor perekonomian. Adanya COVID-19 menyebabkan nilai tukar rupiah melemah, per tanggal 9 april 2020 nilai rupiah melemah sebesar 11,32% dalam waktu 39 hari, dan pelemahan yang terburuk pada tanggal 23 Maret 2020 melemah hingga 16,19%. Sri Mulyani bahkan mengatakan krisis yang disebabkan oleh COVID-19 ini lebih kompleks dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh resesi yang belum bisa ditahan (Estro Darianto Sihalohe 2020). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akibat adanya COVID-19 mengalami pertumbuhan yang melambat sebesar 2,97% pada kuartal 1 per tahun 2020, jika dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2019 Indonesia dapat mengalami kenaikan mencapai 5,02%, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,41% (Indayani and Hartono 2020). Dampak ini sangat dirasakan seluruh daerah di Indonesia dan seluruh lapisan masyarakat termasuk Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang fokus pada pencapaian pembangunan nasional, melalui perencanaan pembangunan yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan adanya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan otonomi daerah yang didukung oleh banyak faktor, yaitu faktor yang paling utama adalah

faktor keuangan. Faktor ini sangat penting karena berupa sumber daya finansial untuk pembiayaan dalam menyelenggarakan roda Pemerintah Daerah. Kinerja keuangan daerah yang baik dapat dinilai dari efektivitas dalam menggali potensi daerah, ketergantungan kepada pemerintah pusat yang lebih rendah, dan porsi yang lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai pembangunan, sehingga kemampuan kinerja yang baik akan memberikan dampak yang baik juga terhadap pembangunan daerah. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam sebuah anggaran yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin berkembangnya jumlah industri dan pengolahan di Kabupaten Sidoarjo, diharapkan mampu meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun serta dapat memberikan kontribusi lebih terhadap penerimaan pajak dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada laporan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Rheswari dan Akbar, 2022).

Tabel 1.1 Total Pendapatan Kabupaten Sidoarjo

Tahun	PAD
2017	4.045.685.362.112,53
2018	4.332.577.984.768,01
2019	4.444.626.346.624,69
2020	4.411.615.214.581,65

Sumber : BPKAD Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat peningkatan PAD pada Kabupaten Sidoarjo selama tiga tahun berturut yaitu dari tahun 2017-2019 sebelum adanya pandemi COVID-19 di Indonesia. PAD pada tahun 2017 sebesar 4.045.685.362.112,53 dan mengalami peningkatan sampai dengan di tahun 2019 sebesar 4.444.626.346.624,69. Selain itu hasil dari pengukuran rasio pertumbuhan pendapatan daerah didapatkan tahun 2017 sebesar 10,30%, tahun 2018 sebesar 7,09% dan tahun

2019 sebesar 2,59% yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017-2019 mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif. PAD sangat menentukan kinerja keuangan daerah, sehingga dengan adanya potensi yang dimiliki oleh setiap daerah diharapkan dapat memanfaatkan potensi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Sedangkan pada tahun 2020 ekonomi Kabupaten Sidoarjo mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,69%, selain itu anggaran pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo yang sebelumnya sebesar Rp. 3,9 triliun turun drastis hingga Rp. 583,4 miliar atau turun sebesar 12,86% dari APBD tahun anggaran 2020 yang mencapai 4,5 triliun (jatim.bpk.go.id). berdasarkan pengukuran rasio pertumbuhan pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalami pertumbuhan pendapatan negatif pada tahun 2020 sebesar (-0,74%) dan mengalami penurunan PAD yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 4.444.626.346.624,69 menjadi 4.411.615.214.581,65.

Analisis kinerja keuangan daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh (Vebiani dan Dian Hardiana 2022) pada studi kasus Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat dan didapatkan hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kinerja keuangan daerah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 dilihat dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan. Namun, tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian keuangan dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Kinerja keuangan pada saat COVID-19 mengalami perbaikan dilihat dari rasio kemandirian dan rasio derajat desentralisasi fiskal. Sementara kinerja keuangan dari rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Amal dan Wibowo 2022) didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta secara umum mampu mempertahankan rasio keuangan utama seperti

rasio kemandirian, efektivitas dan DSCR. Adapun rasio aktivitas dan pertumbuhan cenderung mengalami penurunan kinerja selama periode pandemi COVID-19.

Untuk mengetahui perbedaan dan dampak yang lebih mendalam mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada saat pandemi COVID-19, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD. Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah kabupaten antara lain menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio derajat desentralisasi fiskal menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, rasio ketergantungan keuangan daerah menggambarkan ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan kebutuhan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai rumah tangga daerah menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk mengetahui besarnya efisiensi dalam mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Mahmudi, 2016). Dengan adanya penelitian ini maka akan dapat diketahui ada atau tidaknya perbedaan pada kinerja keuangan dan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam mengelola keuangan daerahnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada saat COVID-19 diukur dari Rasio Derajat Desentralisasi ?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada saat COVID-19 diukur dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ?
3. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada saat COVID-19 diukur dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ?
4. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada saat COVID-19 diukur dari Rasio Efektivitas Keuangan Daerah?
5. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada saat COVID-19 diukur dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
6. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada saat COVID-19 ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 diukur dari Rasio Derajat Desentralisasi.
2. Untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 diukur dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.
3. Untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada

saat pandemi COVID-19 diukur dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

4. Untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 diukur dari Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.
5. Untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 diukur dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.
6. Untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo sebelum dan pada saat pandemi COVID-19.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini manfaat yang dapat diambil antara lain :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna terutama untuk peningkatan ilmu pengetahuan yang menjadi sumber pustaka ataupun acuan yang bisa membagikan informasi secara teori dan empiris kepada pihak yang nantinya akan melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang persoalan ini serta memperbanyak sumber pustaka yang sudah ada.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagai masukan dan representasi Pemerintah Daerah untuk memutuskan kebijakan serta menentukan pedoman dan rencana untuk pembetulan kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masa yang akan datang.

2. Bagi penulis, penelitian ini dapat menjadi sarana perwujudan akademik mahasiswa serta dapat menambah wawasan dan ketajaman analisis.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan informasi yang berguna bagi masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

